

# EFEKTIVITAS PENYEBARAN INFORMASI PUBLIK OLEH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DI KABUPATEN SOPPENG

Sy. Akbar Iqramullah

NPP. 29.1425

Asdaf Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan  
Program Studi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan

Email: akbariqram34@gmail.com

## ABSTRACT (in english)

**Problem/Background (GAP):** The dissemination of public information is the process of conveying information to the public that contains true and clear data and information about all activities carried out by the government. **Objective:** The purpose of this study is to find out how effective the dissemination of public information is carried out by the Communication and Informatics Service, which in this case is the acting task of the local government in the field of information in order to create transparency to the people of Soppeng Regency. **Method:** The method used in this study is qualitative with a descriptive approach and to measure the degree of effectiveness using the theory of Gibson and Steers. The data collection techniques used are interviews by structure, observation and documentation. **Results/Findings:** The results of observations and interviews conducted by the author found that the Effectiveness of Public Information Dissemination by the Communication and Informatics Service of Soppeng Regency can be said to be running quite effectively. Both from productivity, quality, efficiency, and satisfaction. **Conclusion:** the dissemination of public information carried out by the Communication and Informatics Service of Soppeng Regency has gone quite well, but there are still shortcomings so that the Communication and Informatics Service must work harder to increase the effectiveness of disseminating information to the public. **Keywords:** Effectiveness, Dissemination of Public Information, Communication and Informatics Service

## ABSTRAK (in bahasa)

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Penyebaran informasi publik merupakan proses penyampaian informasi kepada masyarakat yang memuat data serta informasi yang benar dan jelas mengenai segala aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa efektif penyebaran informasi publik yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika yang dalam hal ini sebagai pelaksana tugas pemerintah daerah di bidang informasi dalam rangka menciptakan transparansi kepada masyarakat Kabupaten Soppeng. **Metode:** Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan untuk mengukur tingkat efektivitas menggunakan teori Gibson dan Steers. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara secara terstruktur, observasi dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan oleh penulis ditemukan bahwa

Efektivitas Penyebaran Informasi Publik Oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Soppeng dapat dikatakan berjalan cukup efektif. Baik dari produktivitas, kualitas, efisiensi, dan kepuasan. **Kesimpulan:** penyebaran informasi publik yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Soppeng sudah berjalan dengan cukup baik, namun masih terdapat kekurangan sehingga Dinas Komunikasi dan Informatika harus bekerja lebih keras untuk meningkatkan efektivitas penyebaran informasi kepada masyarakat

**Kata kunci:** Efektivitas, Penyebaran Informasi Publik, Dinas Komunikasi dan Informatika

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang teknologi komunikasi serta informasi telah mengakibatkan terjadinya perubahan tatanan serta pembaruan kehidupan masyarakat berbangsa serta bernegara, baik dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan serta keamanan. Hal ini menunjukkan jika peran informasi serta komunikasi jadi sangat berarti serta turut mempengaruhi cara pandang serta pola pikir manusia. Manusia sebagai makhluk sosial tidak akan pernah lepas dari Komunikasi. Dengan adanya komunikasi menjadikan manusia yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, yang pada akhirnya akan mengerti dan memahami pesan yang telah disampaikan agar dapat menghasilkan feedback, yaitu adanya interaksi

Informasi merupakan kebutuhan sosial yang tidak akan pernah lepas dari komunikasi. Dengan adanya komunikasi menjadi manusia yang awal tidak tahu menjadi tahu, dan pada akhirnya akan mengerti dan memahami pesan yang telah disampaikan agar dapat menghasilkan *feedback*, yaitu adanya interaksi. Reformasi dibidang telekomunikasi dan teknologi informasi berdampak pada peningkatan efektifitas peran telekomunikasi dan informasi. sistem manajemen yang lebih kompleks dengan memanfaatkan teknologi canggih membuka ruang informasi publik dan meningkatkan kesadaran publik untuk mengawal pemerintahan yang demokratis akuntabel dan transparan.

Dengan diberlakukannya UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah daerah memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dengan memperhatikan prinsip demokrasi, persamaan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia

Proses pemberian informasi publik oleh instansi pemerintah terkait erat dengan kegiatan konsumsi dapat dipandang sebagai suatu cara untuk menyampaikan informasi secara khusus agar masyarakat dapat mempresepsikannya dengan mudah, cepat dan akurat. Namun, informasi ini mungkin tidak berfungsi dengan baik jika proses komunikasi yang sedang berlangsung tidak ada dan tidak efektif. Komunikasi merupakan elemen penting dari proses sosialisasi dalam masyarakat. Proses sosialisasi berkaitan dengan suatu masyarakat dimana terjadi interaksi sosial pada setiap individu atau kelompok

Tujuan utama keterbukaan informasi disetiap negara adalah untuk membuat setiap instansi pemerintah lebih akuntabel dan dapat diandalkan dalam menyediakan informasi dan dokumentasi dalam menanggapi kebutuhan publik. Menjadi tanggung jawab pemerintah dan otoritas publik untuk menjaga akses informasi tetap terbuka, informasi adalah hak milik publik dan bukan milik pemerintah atau entitas pemerintah. Namun, sementara pemerintah harus mencapai keseimbangan



antara pengungkapan dan kepentingan publik, kepentingan harus didahulukan. Aturan tentang keterbukaan informasi diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Salah satu upaya untuk mengenali kebutuhan informasi masyarakat adalah dengan membuat penyelenggaraan negara menjadi transparan. Transparan dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah pelaksanaan tugas dan kegiatan yang dapat diakses publik untuk proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan atau pengelolaan dan mudah diakses, oleh semua yang membutuhkan informasi. Pelayanan publik kepada masyarakat dan keterbukaan informasi tidak dapat dipisahkan

Pemerintah sebagai organisasi yang memiliki tugas pelayanan informasi harus bisa memberikan pelayanan informasi yang berkualitas demi peningkatan pelayanan informasi bagi masyarakat. Dalam hal ini, Kementerian komunikasi dan informasi yang diberikan amanah sebagai koordinator kehumasan, menjadi wadah atau perpanjangan tangan dari pemerintah yang mempunyai fungsi untuk mensinergikan kekuatan penyebaran informasi di seluruh lembaga instansi pemerintah, terkhusus pada penelitian kali ini yang dimaksud adalah Dinas Informasi dan Komunikasi Pemerintah Kabupaten Soppeng, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya diskominfo ini harus bisa memanfaatkan media informasi yang tersedia dalam mendukung penyebaran informasi terkait program prioritas pemerintah

Media informasi pemerintah merupakan salah satu media yang dapat menawarkan banyak manfaat dalam menyebarkan informasi publik. Misalnya, dalam hal permintaan pembayaran pajak yang signifikan, informasinya disampaikan melalui media cetak atau media online seperti website, dengan tetap didistribusikan dalam jangka waktu tertentu, dan sasaran informasi atau publik itu penting. Bisa mendapatkan pembayaran pajak dengan melihat informasi, dan akhirnya terjadi diskusi di masyarakat, dan masyarakat tergerak untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara bersama-sama

Dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Soppeng (PERBUP) Nomor 67 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Soppeng, menjadikannya sebagai acuan dasar dalam pelayanan informasi masyarakat kabupaten Soppeng. Peraturan ini dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi masyarakat berdasarkan prinsip pelayanan informasi masyarakat yang cepat, tepat, transparansi, akuntabel, dan profesionalitas serta mudah dilingkungi pemerintah daerah

Namun, penerapannya di masyarakat menimbulkan banyak masalah, seperti kebingungan informasi berupa kepemilikan, kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan oleh beberapa instansi. Khususnya SKPD di wilayah Pemerintahan Kabupaten Soppeng, minimnya kemampuan sumber daya manusia dalam memproduksi dan menyebarkan informasi menyebabkan ketimpangan antar wilayah dikarenakan wilayah Kabupaten Soppeng yang berada di kawasan hutan dan pegunungan, sehingga akses lahan menjadi sulit dalam waktu singkat. Selain itu, tantangan yang kita hadapi saat ini terkait dengan infrastruktur berupa kendala jaringan, kurangnya peralatan yang memadai, dan sumber daya manusia yang handal di bidang telekomunikasi dan teknologi informasi

## **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP)**

Ada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan penyebaran informasi publik di lingkup kabupaten Soppeng. yaitu sumber daya manusia dan sumber daya sarana dan prasarana. Sumber daya manusia salah satu faktor yang sangat penting dalam menunjang penyebaran informasi publik di Kabupaten Soppeng. Dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia yang mencukupi maka, pelaksanaan penyebaran informasi publik dapat berjalan efektif dan baik. Namun sebaliknya, jika ketersediaan sumber daya manusia tidak mencukupi tentunya akan menjadi masalah dalam penyebaran informasi

publik sehingga tidak dapat berjalan dengan baik. Kualitas dari sumber daya manusia sangat menentukan bagaimana proses dan hasil informasi yang akan diberikan kepada masyarakat. Selain itu, untuk pendukung proses penyebaran informasi publik dibutuhkan sumber daya sarana dan prasarana yang baik dan cukup untuk melakukan penyebaran informasi kepada masyarakat. Sumber Daya Sarana dan Prasarana merupakan faktor untuk menentukan apakah memadai atau tidak dan bagaimana kemudahan dalam penyebaran informasi publik. Sumber daya teknologi yaitu perangkat keras (Komputer/Laptop,Printer), perangkat lunak dan jaringan internet juga menjadi faktor yang sangat menentukan pada Penyebaran Informasi Publik. Sumber Daya Sarana dan Prasarana merupakan penunjang dalam proses penyebaran dan pelayanan informasi publik, apabila sarana dan prasarana tidak memadai maka hal ini sangat berpengaruh terhadap produktivitas informasi. tentu saja dengan adanya permasalahan ini akan memperlambat jalannya penyebaran dan pelayanan informasi kepada publik

### **1.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian terdahulu, yang membahas tentang penyebaran informasi publik baik itu melalui media sosial, media online, dan lain-lain. Penelitian Anang Setiawan, Herdin Arie dan Muhammad Eko Atmojo Tahun 2020 yang berjudul “Efektivitas Penyebaran Informasi Covid-19 Melalui Media Twiter oleh Kementerian Kehatan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.” menemukan bahwa Pola interaksi berdasarkan mentions sangat mempengaruhi jalannya aktivitas informasi di media sosial berbagai platform. Ini dikarenakan saling mendukung serta menguatkan isi dari sebuah informasi dan relasi hubungan antara lembaga yang ada di suatu negara dengan beberapa tema yang sama. Pada platform twitter mentions sangat berguna untuk mendukung sebuah informasi dengan tema yang sama dan relevan akan dibahas lebih lanjut. Interaksi berdasarkan mentions pada akun twitter Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia. Penelitian Erwin Hidayat Tahun 2019 dengan judul “Penyebaran dan Penerimaan Informasi Publik dari Diskominfo di Kalangan Masyarakat Kabupaten Wonosobo” Penelitian ini menjelaskan bahwa Kegiatan penyebaran informasi kebijakan publik di Kabupaten Wonosobo adalah untuk pengembangan dan pemberdayaan sistem informasi dan komunikasi dalam rangka meningkatkan kualitas informasi di kabupaten dan kota yang nampaknya dapat menjawab tantangan yang berkembang. Penyebaran atau pelayanan informasi publik.terutama kegiatan yang terkait dengan tugas pelayanan/penyebaran informasi publik disesuaikan dengan tugas dan fungsinya,. Penelitian Rendi Seftiyan Tahun 2015 yang berjudul “Penyebaran Informasi Pemerintah Kabupaten Sumedang Melalui Radio eRKS FM ” konsep penyebaran informasi melalui media radio adapun metode penelitian yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif. Dapat disimpulkan bahwa Radio eRKS FM adalah radio yang dibawah oleh Bidang Hubungan Masyarakat pada Sub bagian Pemberitaan dan Dokumentasi yang mempunyai tugas Pokok dalam penyebarluasan Informasi berkenaan dengan kegiatan serta 5 berita yang berada di ruang lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumedang. Radio eRKS FM merupakan salah satu media yang digunakan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumedang dalam mempublikasikan informasi terhadap masyarakat khususnya pada masyarakat Kabupaten Sumedang. Media radio dalam penyebarluasan informasinya merupakan media yang diunggulkan dibanding media-media yang lainnya, karena media radio bukan hanya media hiburan yang bersifat audio, melaikan juga sebagai media inforamasi dalam bidang edukasi serta pemberitaan. Penelitian Tifa Nabila Ramadhantidan Dadan Mulyana dengan judul “Penyebaran Informasi Publik Melalui Media Sosial” Kedutaan Besar Republik Indonesia di Den Haag melakukan penyebaran informasi melalui media sosial yang dimilikinya, salah satunya adalah media sosial twitter. Konten yang dibuat oleh Kedutaan Besar



Republik Indonesia melalui media sosialnya haruslah melalui serangkaian proses penyaringan konten sebelum diunggah pada media sosialnya. Hal ini dilakukan agar menghindari masyarakat yang mendapatkan kesalahan informasi. Hal pertama yang dilakukan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Den Haag dalam membentuk konten informasi untuk disebarkan kepada publik yakni penyaringan informasi. Hal ini dirasa penting untuk dilakukan karena sebelum menyebarkan informasi kepada publik pembuat konten informasi harus menimbang dengan baik jenis konten informasi yang akan disebarkan. Setelah proses screening dilakukan oleh pejabat atau Diplomat dari Fungsi yang berkaitan dengan yakin bahwa publik mendapatkan informasi terbaik Penelitian Sri Wulandari Tahun 2016 yang berjudul “Pengelolaan Media Online Website Dalam Penyebarluasan Informasi Publik Oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistika” implementasi pengelolaan media website online dalam penyebaran informasi publik yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi Informasi dan Statistika Provinsi Riau pada tahun 2016 cukup baik. Beberapa faktor yang menghambat pengelolaan website dalam penyebaran informasi publik disebabkan oleh kurangnya data yang akan disebarluaskan melalui website, keterbatasan anggaran, tidak adanya SOP yang jelas dalam mengelola website, kurangnya pemanfaatan fasilitas dan konten yang tersedia serta kurangnya komitmen manajemen dalam menerapkan pengelolaan website

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Pada penelitian terdahulu yang telah dijelaskan diatas memiliki beberapa kesamaan dengan penelitian yang diangkat oleh peneliti yaitu penggunaan media sosial dan media radio dalam menyebarkan informasi publik. Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian lebih berfokus pada segala aktivitas penyebaran informasi publik oyang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika baik itu melalui media online, media sosial, media cetak dan lain-lainnya yang digunakan sebagai sarana komunikasi publik di Kabupaten Soppeng.

#### **1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengalisis dan mendeskripsikan efektivitas penyebaran informasi publik oleh Dinas Komuinikasi dan Informatika di Kabupaten Soppeng serta untuk mengetahui dan mendeskripsikan Apa saja faktor penghambat yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Soppeng dalam penyebaran informasi kepada masyarakat di Kabupaten Soppeng

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif dengan mendekan induktif agar dapat menghasilkan informasi deskriptif tentang dan penyebaran informasi publik. melalui metode kuantitatif ini peneliti dapat mengetahui pelaksanaan kegiatan yang sebenarnya dalam proses pelaksanaan program Diskominfo dalam penyebaran informasi publik dan memperoleh berbagai perspektif atas fakta-fakta di lapangan

Menganalisis data menurut Sugiono (2018:111) melalui tipe analisis data yang memiliki Komponen dalam analisis data (interactive model) yakni mereduksi data, menyajikan data dan menyimpulkan data. Menurut Sugiyono analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan saat berlangsungnya pengumpulan data. Selanjutnya setelah selesai mengumpulkan data dalam waktu yang ditentukan. Ketika melakukan wawancara, peneliti secara langsung menganalisis jawaban yang didapatkannya. Apabila jawaban tersebut dirasa kurang puas, maka peneliti akan mengajukan pertanyaan lagi hingga memperoleh data yang sesuaidengan kebutuhan data peneliti. Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam melalukan pengumpulan data kualitatif, peneliti

melakukan wawancara secara mendalam dengan 9 orang informan

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas terwujud apabila proses pelaksanaan menunjukkan keseriusan dengan kenyataan. Efektivitas dijadikan sebagai tolak ukur dalam menilai sejauh mana pelaksanaan berjalan, dan sejauh mana sasaran telah dicapai. Sehingga apabila tercapai efektivitas dalam pelaksanaan maka program tersebut atau sistem telah mencsapai tujuan. Faktor penting yang menentukan keberhasilannya dalam melihat efektivitas penyebaran informasi publik, beberapa faktor penting tersebut yaitu produktivitas, mutu/kualitas, efesiensi, fleksibilitas dan kepuasaan.

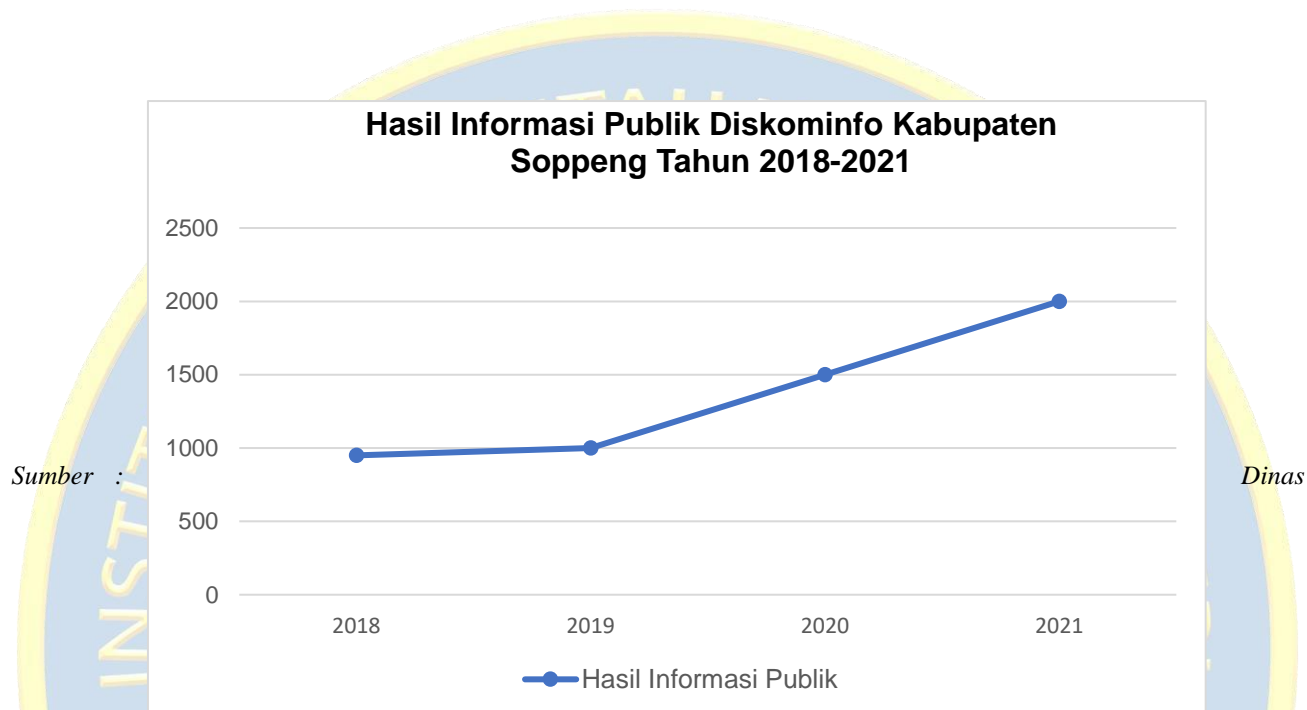
#### 3.1 Produktivitas

Salah satu dimensi yang merupakan faktor yang mempengaruhi efektivitas dalam penyebaran informasi publik adalah Produktivitas yaitu kemampuan organisasi dalam menghasilkan sejumlah barang atau jasa seperti yang dituntut oleh lingkungan. Terdapat dua indikator untuk dapat mengukur dimensi produktivitas dari penyebaran informasi publik

Diskominfo Kabupaten Soppeng membentuk tim humas yang bertugas dalam pengelolaan dan penyebaran informasi publik, dalam tim humas ini terdiri atas 2(dua) tim yaitu rilis dan tim dokumentasi. Dimana tim rilis inilah yang akan membuat berita pada saat suaut kegiatan sedang berlangsung yang memuat 5W + 1 H, sedangkan tim dokumentasi bertugas melakukan pengambilan gambar, *capture*, serta perekaman video saat kegiatan kegiatan berlangsung. Hasil dari peliputan inilah yang menjadi bahan mentah dari informasi publik, lalu diserahkan kepada seluruh media kerja sama Diskominfo, diskominfo melakukan kerjasama dengan 50 media cetak dan 51 media online. Selain itu, penyebaran informasi publik juga dilakukan melalui *website* Pemkab Soppeng yaitu [soppengkab.co.id](http://soppengkab.co.id) dan juga melalui media sosial yang lalu dikelola langsung oleh Dinas Komunikasi yaitu Facebook, Instagram, dan Youtube.



Gambar 1  
Hasil Informasi Publik Diskominfo Kabupaten Soppeng 2018-2021



Sumber : *Komunikasi dan Informasi Kabupaten Soppeng 2022*

Berdasarkan Grafik Hasil Informasi Publik Diskominfo Kabupaten Soppeng diketahui bahwa selama kurun waktu tahun 2018 sampai tahun 2021 ditemui bahwa adanya peningkatan hasil yang dilakukan oleh Diskominfo bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi publik yang senantiasa meningkatkan dan selalu menuntut adanya perbaikan dan pembaharuan informasi agar nantinya masyarakat dapat mengetahui segala aktivitas pemerintah, sehingga akan tercipta keterbukaan informasi publik

### 3.2 Kualitas

Menurut Gibson dalam Sumaryadi (2005:107) mendefinisikan Kualitas adalah Kerja Kualitas, produk yang memenuhi harapan pelanggan dan klien untuk kinerja produk dan jasa, dengan ukuran dan penelitian mutu berasal dari pelanggan masyarakat. Kualitas dan Mutu merupakan salah satu dimensi efektivitas dalam penyebaran informasi publik. Terdapat indikator untuk dapat mengukur dimensi Kualitas, indikator tersebut adalah kualitas informasi.

Di era globalisasi sekarang ini, informasi menjadi sangat penting. Informasi telah menjadi kebutuhan dalam pengembangan sosial dan pribadi bagi setiap individu ataupun masyarakat. Diskominfo selaku penyelenggara pelayanan informasi publik, dalam proses penyampaian informasi tersebut selalu memperhatikan dan mengedepankan kualitas informasi. Sehingga masyarakat sebagai penerima informasi akan mendapatkan informasi yang akurat tanpa ada lagi kesimpangsiuran berita. Selain itu, Diskominfo selalu melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan informasi publik.

Informasi yang berkualitas adalah informasi yang telah memiliki akurasi informasi yang baik, informasi memiliki relevansi dengan kebutuhan masyarakat dan memiliki kebaharuan informasi yang baik, Diskominfo sendiri selalu berupaya melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas. Selain itu, dengan bermunculannya berita hoax di tengah-tengah masyarakat akan memberikan dampak yang buruk terhadap kualitas informasi serta proses penyebaran informasi yang dilakukan oleh Diskominfo. Untuk menghindari hal tersebut Diskominfo sebagai lembaga informasi publik melakukan peningkatan kualitas informasi dan melakukan klarifikasi terkait kebenaran berita tersebut.

Informasi yang disebarkan kepada masyarakat merupakan berita yang benar-benar terjadi dan berlaku di Kabupaten Soppeng, Untuk menjaga agar kualitas informasi tetap terjaga, Diskominfo Kabupaten Soppeng melakukan pengecekan secara berlaka sebelum berita atau informasi publik tersebut kepada masyarakat. Dalam proses pengecekan tersebutlah Diskominfo melakukan pengaturan dan pemilihan informasi dan berita secara saksama agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi di masyarakat. Pembaharuan berita yang dilakukan oleh diskominfo mengikuti perkembangan dan hal yang paling penting adalah kebutuhan masyarakat. Selain itu Diskominfo juga langsung bergerak cepat dalam menindaklanjuti bermunculannya berita hoax yang ada ini bertujuan agar masyarakat tidak terpengaruh akan berita tersebut

### **3.3 Efisiensi**

Menurut Gibson dalam sumaryadi (2005:107) mendefenisikan Efisiensi diartikan sebagai rasio keluaran dibanding masukan, memfokuskan pada siklus, masukan - proses - keluaran, dan bahkan menekankan pada elemen masukan dan proses. Indikator efesiensi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemasukan data pegawai serta pemrosesan data dan informasi pegawai.

#### **a. Ketepatan Waktu**

Ketepatan waktu mengandung arti bahwa pelaksanaan penyebaran informasi kepada masyarakat dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. SOP yang ditetapkan oleh Diskominfo Kabupaten Soppeng dalam penyebaran berita ataupun informasi yang akan disebarkan kepada masyarakat baik itu melalui media cetak maupun media online tidak boleh sampai berganti hari, apabila ada kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemda maka dokumentasi dan rilis harus sudah selesai dan berita tersebut sudah siap di publish hari itu juga. Namun, dalam pelayanan informasi masih cenderung lambat sehingga tidak jarang menimbulkan keterlambatan informasi.

#### **b. Kemudahan Pelayanan dan Penyebaran Informasi Publik**

Kemudahan pelayanan informasi publik merupakan pemenuhan kebutuhan masyarakat untuk memperoleh informasi serta sebagai perwujudan dari keterbukaan informasi. kemudahan layanan informasi menyediakan berbagai kemudahan akses informasi. masyarakat dapat memperoleh informasi melalui berbagai sarana mulai dari media sosial, wa grup, email serta sosialisasi. Pelayanan publik merupakan gerbang utama reformasi birokrasi pemerintah karena didalam pelayanan publik merupakan ruang dimana birokrasi secara langsung berinteraksi dengan masyarakat. Di era *New Publik Service* inilah pelayanan publik harus lebih responsif karena akan langsung terpantau secara transparan oleh masyarakat. Kemajuan teknologi informasi sebagai bagian dari globalisasi tidak terpisahkan dari masyarakat modern seperti sekarang ini yang telah membawa tuntutan yang besar bagi masyarakat terhadap pemerintah sebagai penyedia layanan untuk lebih bersifat terbuka, lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan tugas kepemimpinannya, dan juga memberikan kemudahan terhadap akses informasi khususnya informasi tentang pemeritahan. Pelayanan informaasi kepada masyarakat harus dilakukan secara prima.



Setiap pelayanan informasi yang diberikan kepada masyarakat dimana pelayanan informasi harus dapat dilakukan setiap saat oleh masyarakat. Pelayanan informasi di Diskominfo Kabupaten Soppeng dilakukan melalui 2(dua) cara yaitu : melalui pelayanan offline dimana pelayanan offline ini mengharuskan setiap masyarakat atau pemohon informasi publik harus datang langsung ke kantor Diskominfo untuk melakukan permintaan terhadap informasi. Pelayanan secara offline ini dinilai lambat dan membutuhkan waktu yang lama untuk memperoleh informasi publik. Sedangkan untuk pelayanan online sendiri, masyarakat dapat melakukan permohonan atau permintaan informasi publik kapan saja dan dimana saja dengan biaya yang lebih murah, pelayanan online ini sangat cocok diterapkan pada masa Covid-19 sekarang ini. Penggunaan pelayanan online memang sangat memudahkan masyarakat dalam mengakses dan memperoleh informasi publik.

### **3.4 Kualitas**

Fleksibilitas menyangkut kemampuan organisasi untuk mengalihkan sumber daya dari aktivitas yang satu ke aktivitas yang lain guna menghasilkan produk dan pelayanan yang baru dan berbeda, menanggapi permintaan masyarakat. Untuk mencapai tujuan dengan hasil yang lebih baik terkadang seseorang dituntut untuk melakukan perubahan baik itu dalam skala besar maupun kecil tak terkecuali organisasi.

Pengembangan organisasi merupakan hal yang harus dilakukan dalam setiap organisasi, tujuannya agar organisasi tidak diam disatu titik dan terus berkembang lebih baik. Terlebih di masa pandemi yang masih terus berlanjut, semua lapisan masyarakat terkena dampaknya. Jangankan suatu organisasi, negara besar pun harus melakukan tindakan demi menyelamatkan diri dari bencana global. Dalam suatu organisasi, harus dipahami bahwa semua yang ada di dalamnya adalah satu kesatuan, sehingga harus memiliki tujuan sama untuk menjalankannya. Selama masa pandemi Covid-19 ini Diskominfo kabupaten Soppeng sudah menyiapkan pelayanan informasi publik berbasis online dimana masyarakat dapat mengaksesnya setiap saat. Hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat tanpa harus datang ke kantor lagi.

Diskominfo sebagai penyelenggara penyebaran dan pelayanan informasi publik sudah menyiapkan berbagai alternatif bagi masyarakat untuk tetap mendapat pelayanan informasi publik yaitu melalui pelayanan secara online, dimana pelayanan ini dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin memperoleh informasi publik. adapun media yang disiapkan oleh Diskominfo meliputi : *website* Pemerintah Kabupaten Soppeng yang dapat diakses kapan dan dimana saja oleh masyarakat, dimana di *website* tersebut telah menyediakan berbagai informasi publik yang berkaitan dengan pemerintah Kabupaten Soppeng. Selanjutnya ada PPID Kabupaten Soppeng, PPID ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan permohonan informasi publik kapan saja dan dimana saja

### **3.5 Kepuasan**

Pelayanan dan penyebaran informasi publik yang dilakukan oleh Diskominfo Kabupaten Soppeng, dapat dikatakan sudah baik. Masyarakat sebagai penerima *output* dari proses tersebut sudah dapat merasakan adanya perkembangan dan perbaikan sistem informasi yang dilakukan oleh Diskominfo. ditambah lagi dengan kehadiran kelompok informasi masyarakat yang membantu proses penyampaian informasi kepada masyarakat dengan menjangkau daerah-daerah pelosok yang sulit untuk dicapai oleh pemerintah sendiri. Namun masyarakat sendiri mengatakan bahwa dari segi waktu pelayanan dan permohonan informasi cenderung lambat, hal ini yang akan menjadi salah satu penghambat dari proses pelayanan dan penyebaran informasi kepada masyarakat.

Sehingga dapat dipahami bahwa informasi sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat. Sering dengan kebutuhan masyarakat akan informasi meningkat Diskominfo melakukan

pembaharuan layanan informasi publik, dimana pelayanan yang dulunya lebih banyak dilakukan melalui layanan langsung dan media cetak sekarang pelayanan informasi dilakukan dengan menggunakan media online untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses informasi. Namun, untuk masalah waktu penyelesaian permohonan informasi cenderung agak lambat dikarenakan sumber daya manusianya masih terbatas.

### **3.6 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Efektivitas Penyebaran Informasi Publik yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Soppeng belum sepenuhnya berjalan efektif. Informasi merupakan kebutuhan yang sangat penting saat ini. Informasi memberikan kontribusi bagi perkembangan kehidupan manusia dalam aspek politik, hukum, ekonomi dan sosial budaya. Manusia sebagai makhluk sosial tidak akan pernah lepas dari Komunikasi. Dengan adanya komunikasi menjadikan manusia yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, yang pada akhirnya akan mengerti dan memahami pesan yang telah disampaikan agar dapat menghasilkan feedback, yaitu adanya interaksi. Dalam melakukan penyebaran informasi publik Diskominfo menggunakan media sosial dan media online. Dengan memanfaatkan kedua media tersebut akan memudahkan penyebaran informasi kepada masyarakat karena kedua media tersebut paling banyak digunakan oleh masyarakat, hal ini serupa dengan penelitian (Erwin Hidayat, 2019). Selain menggunakan kedua media tersebut Diskominfo Kabupaten Soppeng juga menggunakan berbagai media penyebaran informasi publik diantaranya media cetak, dan website pemkab Soppeng. Hal ini tidak serupa dengan penelitian (Anang (setiawan dkk., 2020).

Penyebaran informasi publik yang dilakukan oleh Diskominfo Kabupaten Soppeng . Ini bertujuan untuk memberikan perluasan pengetahuan kepada masyarakat mengenai informasi publik sehingga memberikan transparansi kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Soppeng agar dapat menciptakan keterbukaan informasi publik. (Sri Wulandari, 2016).

## **IV. KESIMPULAN**

Penulis menyimpulkan bahwa Efektivitas Penyebaran Informasi Publik Oleh Diskominfo di Kabupaten Soppeng pada umumnya berjalan dengan cukup baik dan cukup efektif. Hal ini berdasarkan identifikasi dari lima dimensi teori Gibson dan Steers dalam Sumaryadi (2005 : 07) yaitu Produktivitas, Kualitas, Efisiensi, Fleksibilitas, dan Kepuasan. Dalam pelaksanaannya tidak sedikit kendala yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Soppeng dalam penyebaran informasi publik diantaranya adalah kekurangan sumber daya manusia yang berkulitas dan memiliki kemampuan untuk melakukan penyebaran informasi publik dan kekurangan sumber daya sarana dan prasarana yang akan mengganggu proses penyebaran informasi publik sehingga akan mengakibatkan ketelambatan informasi kepada masyarakat.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan yakni waktu yang dimiliki dalam pelaksanaan penelitian terbatas hanya selama 14 hari

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** penulis memfokuskan hasil dari penelitian ini untuk menjelaskan lebih tentang bagaimana efektivitas penyebaran informasi publik oleh Dinas Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Soppeng. Penulis berharap dengan adanya penelitian ini maka akan dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan efektivitas penyebaran informasi publik, agar nantinya masyarakat dapat mengetahui semua aktivitas yang dilakukan pemerintah sehingga nantinya tercipta keterbukaan informasi publik



## V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Soppeng beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian ini.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Adam Ibrahim Indrawijaya. 2010. *Teori Perilaku, Dan Budaya Organisasi*. Jakarta: Refika Aditama.
- Adam Ibrahim Indrawijaya. 2014. *Revalidasi Administrasi Pembangunan*. Bandung: Alfabeta.
- Amal, Ichlasul dan Armaidly Armawi. 1999. *Keterbukaan Informasi Dan Ketahanan Nasional*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Anggraen, Elisabet Yunaeti. 2017. *Pengantar Sistem Informasi, Ed.* Yogyakarta: Erang Risanto.
- Azwar, Saifuddin. 2003. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Baltzan, P., Philips, A., & Deltor, B. 2008. *Businnes-Driven Information System (1st Canadian Ed)*. edited by O. Whitby. Canada: McGraw-Hill Ryerson.
- Creswell, John W. 2016. *Research Design : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran Ed.4*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Dan B. Curtis, James J. Floyd dan Jerry L. Winser. 1996. *Komunikasi Bisnis Dan Profesional*. edited by Y. Wirasmita. Bandung: Rosda.
- Siyasah, As. 2020. "MANAJEMEN LAYANAN INORMASI PUBLIK PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Risa Dwi Ayuni FISIP- Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Email: Rda.Academic@gmail.Com." 5(2):80-87.
- Mulyana, Dadan dan Tifa Nabila Ramadhanti. 2018. *Penyebaran Informasi Publik Melalui Media Sosial*
- Lutfi Wahyu Pamungkas. 2019. "Efektivitas Pengelolaan Informasi Publik Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Ciamis." Universitas Galuh.
- Wilson, Thomas D. 2003. "Information Management." 263-78
- Hidayat, Erwin. 2019. "Penyebaran Dan Penerimaan Informasi Publik Dari Diskominfo Di Kalangan Masyarakat Kabupaten Wonosobo."
- Seftiyan, Rendi. 2015. "Penyebaran Informasi Pemerintah Kabupaten Sumedang Melaui Radio ERKS FM."
- Anang Setaiwan, Herdin Arie Saputra dan Muhammad Eko Atmojo. 2020. "Efektivitas Penyebaran Informasi Covid-19 Melalui Media Twitter Oleh Kementrian Kehatan Dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana." Website Kabupaten Soppeng. (<https://soppengkab.go.id/>).
- Website Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sulawesi Selatan. (<https://kominfo.sulselprov.go.id/>).
- Website Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Soppeng (<https://diskominfo.soppengkab.go.id/>).
- Website Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng. (<https://soppengkab.bps.go.id/>).